



Available online at **FACTUM**; Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
website: <https://ejournal.upi.edu/index.php/Factum>
FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 13(2), 197-206



RESEARCH ARTICLE

SHIRIN EBADI, CITA-CITA SANG HAWA DI TANAH BANGSA ARYA

Timmi Pratimi, Ayi Budi Santosa

Prodi Pendidikan Sejarah, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia

timmypratimi13@gmail.com

To cite this article: Pratimi, T., & Santosa, A.B. (2024). Shirin ebadi: Cita-cita hawa di tanah bangsa arya. **FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah**, 13(2), 197-206. <https://doi.org/10.17509/factum.v13i2.31317>.

Abstract

The progress of the Iranian state is not directly proportional to the realization of civil rights between men and women. One of the women who has a special concern for women's issues in Iran is Shirin Ebadi, a human rights activist from Iran, she tries to fight for and restore what is right for herself and other members of society. The main problem raised in this study is How the Role of Shirin Ebadi in the Issue of Women's Rights in Iran (Review of Social Aspects of 1990-2003)? The methods used were including source collection, source criticism, interpretation, and historiography. The results of the research can be explained that the role of Shirin Ebadi has an impact on the lives of women in Iran, the parliament seats which were originally filled by men, now women have begun to be involved in the political world in Iran. Regime change seems to have never been the initial milestone for elimination of violence against women in Iran. The idea of establishing a Defend of Human Rights Center is very important for Shirin as a forum for women or children who are victims of human rights injustice in Iran.

Abstrak

Kemajuan Negara Iran tidak berbanding lurus dengan penyamarataan hak sipil antara laki-laki dengan perempuan. Salah satu perempuan yang memiliki perhatian khusus terhadap masalah perempuan di Iran adalah Shirin Ebadi, seorang aktivis HAM dari Iran, dirinya mencoba untuk memperjuangkan dan mengembalikan apa yang menjadi hak bagi dirinya sendiri dan anggota masyarakat lainnya. Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini peranan Shirin Ebadi dalam permasalahan hak-hak perempuan di Iran (Tinjauan aspek sosial tahun 1990-2003)?. Adapun metode yang digunakan adalah yaitu meliputi pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa peranan Shirin Ebadi memberikan dampak bagi kehidupan perempuan di Iran, kursi parlemen yang semula diisi penuh oleh para laki-laki kini kaum perempuan pun sudah mulai bisa berkecimpung dalam dunia politik di Iran. Pergantian rezim seolah tidak pernah menjadi tonggak awal untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Iran. Gagasan untuk membentuk *Defend of Human Right Center* menjadi sebuah hal yang sangat penting bagi Shirin sebagai wadah untuk para perempuan ataupun anak-anak yang menjadi korban ketidakadilan HAM di Iran.

© 2024 Kantor Jurnal dan Publikasi UPI

Article Info

Article History:

Submitted/Received 14 Jan. 2021
First Revised 30 January 2024
Accepted 01 Sept 2024
First Available online 30 Oct 2024
Publication 30 Oct 2024

Keyword:

Shirin Ebadi
Gender injustice
Iran

PENDAHULUAN

Kemajuan Negara Iran tidak berbanding lurus dengan penyamarataan hak sipil antara laki-laki dengan perempuan, sehingga penting rasanya untuk mengangkat gerakan yang dilakukan oleh para perempuan di Iran, yang mana seringkali dipandang sebelah mata, makhluk yang tidak berdaya, serta tidak mampu melakukan suatu perubahan. Bila kita mendengar kata perempuan maka selalu dikaitkan dengan posisinya yang lemah sehingga menuntun kita dalam bayangan ketidakadilan. Ketidakadilan ini diantaranya meliputi cara pandang serta penindasan yang terjadi seperti halnya penindasan berupa pemangkasan hak-hak diri atas perempuan.

Warren (dalam Arivia, 2006, hlm. 381-383) juga mengungkapkan bahwa cara pikir hierarkis, dualistik (biner), dan menindas adalah pola pikir maskulin yang telah mengancam keselamatan bagi perempuan. Penindasan terhadap hak perempuan ini terjadi pula di banyak negara di dunia, salah satu negara yang mengalami penindasan kepada perempuan dengan aturan-aturan yang mengekang dan membatasi kebebasan adalah Iran.

Rezim Pahlevi sebagai penguasa di Iran dengan sederhana dan drastisnya mengubah kedudukan perempuan. Sejak awal tahun 1920 beberapa tokoh intelektual sedang berusaha memperjuangkan peningkatan pendidikan, status sosial, dan hak-hak bagi perempuan. Walaupun dalam jumlah yang sedikit, beberapa perempuan mulai memasuki pekerjaan pada sektor pendidikan, kesehatan, bahkan di dalam sektor industri. Namun, setelah lama memerintah, sebuah kebijakan baru dikeluarkan oleh Pahlevi, yang mana salah satunya dirasa kurang etis untuk perempuan yang menganut agama Islam, yaitu larangan untuk mengenakan hijab.

Tahun 1979-2005 merupakan masa-masa yang sulit bagi perempuan Iran. Pertama, mereka mengalami dampak yang sangat besar

dari revolusi, karena terlihat dari status sosial dan aspek kehidupan lainnya posisi perempuan dirasa makin menurun. Konsekuensi dari kebangkitan agama yang awalnya diharapkan—adanya hembusan angin segar bagi perempuan.

Adapun kebijakan-kebijakan tersebut adalah larangan bagi perempuan untuk bernyanyi di tempat umum dan menjadikan bernyanyi sebagai mata pencaharianya, tidak adanya hak dalam kekuasaan politik, marginalisasi ekonomi, dan kembalinya aturan pelik mengenai perceraian sepihak, poligami, dan pernikahan. Ketidakadilan gender bagi perempuan tersebut menandai sepuluh tahun pertama Revolusi Islam. Dekade kedua dalam Republik Islam juga terlihat dengan munculnya pergeseran kebijakan, kepemimpinan baru, dan meningkatnya harapan masyarakat. Namun, itu hanyalah janji-janji reformasi—pada akhirnya pemerintah lupa akan janjinya. Salah satu perempuan yang memiliki perhatian khusus terhadap masalah perempuan di Iran adalah Shirin Ebadi, seorang aktivis HAM dari Iran. Dirinya mencoba untuk memperjuangkan dan mengembalikan apa yang menjadi hak bagi dirinya sendiri dan anggota masyarakat lainnya. Berawal dari pekerjaannya sebagai seorang pengacara, Shirin menganggap bahwa posisi perempuan berada di titik terendah pada saat itu. Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan di Iran membuat Shirin ebadi membuat lembaga bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, terlebih lagi bagi perempuan.

Permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah perjuangan Shirin Ebadi dalam mengatasi masalah hak-hak perempuan di Iran (1990–2003). Di mana perjuangannya harus menghadapi berbagai permasalahan yang pelik—terlihat dari kondisi Iran.

METODE

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam merancang penulisan penelitian ini ialah

metode historis atau metode sejarah. Metode historis menurut Louis Gottschalk (1986, hlm. 72) adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan pada masa lampau, dengan menggunakan metode historis ini peneliti mampu merekonstruksi peristiwa yang dialami oleh manusia pada masa lampau. Semua data dan hasil peninggalan dari manusia pada masa lampau dijadikan sebuah bukti yang dipergunakan sebagai alat untuk merekonstruksi sejarah. Metode historis sering digunakan dikarenakan peristiwa sudah dilalui, dan tidak banyak pelaku atau narasumber sebagai sumber yang dapat dimintai keterangannya sebagai sumber premier.

Menurut Helius Sjamsuddin, metode historis adalah suatu prosedur, proses, atau teknik yang sistematis dalam penyidikan suatu disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan objek (bahan-bahan) yang diteliti (2012, hlm. 11). Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Helius Sjamsuddin, Abdurrahman dalam karyanya yang berjudul *Metodologi Penelitian Sejarah*. Ia mengungkapkan bahwa metode historis adalah penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari perspektif historis (2007, hlm. 53). Daliman juga mengatakan hal yang serupa bahwa metode penelitian sejarah diartikan sebagai penulisan sejarah dengan menggunakan cara, prosedur atau teknik yang sistematis sesuai dengan asas-asas dan aturan ilmu sejarah (2012, hlm. 27).

Dalam hal ini, secara teknis tahap-tahap tersebut dapat diuraikan menjadi: (1) Heuristik atau pengumpulan sumber. Dalam tahap ini sumber sejarah yang diperlukan berupa sumber tertulis atau literatur seperti dokumen-dokumen, buku-buku, artikel, jurnal dan lainnya. Sementara sumber lisan atau oral history bisa didapat dari wawancara terhadap pelaku dan atau saksi dari suatu peristiwa sejarah. (2) Kritik atau verifikasi sumber. Peneliti secara teknis menganalisa berkesinambungan antar keterangan yang

diberikan oleh narasumber satu dengan narasumber lain. (3) Interpretasi. Interpretasi memiliki arti pendapat atau pandangan teoretis, suatu tafsiran yang diberikan terhadap sesuatu, dalam hal ini data-data yang telah diuji otensitasnya sebelumnya baik secara eksternal maupun internal. (4) Historiografi. Historiografi adalah tahapan terakhir dari suatu metode historis. Historiografi merupakan cara peneliti menyajikan dan memaparkan suatu hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode historis atau metode sejarah merupakan serangkaian langkah yang digunakan untuk mengkaji suatu peristiwa, topik, atau permasalahan di masa lampau yang kemudian diuraikan secara deskriptif, kritis, sistematis dan kronologis, karenanya tidak lepas dari sudut pandang sejarah. Metode historis ini dibantu dengan teknik studi literatur dan wawancara. Teknik studi literatur dilakukan dengan cara mengkaji sumber-sumber literatur atau referensi yang berupa buku, dokumen, jurnal, skripsi, tesis, dan sebagainya yang berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang dibahas peneliti, sedangkan wawancara kerap digunakan peneliti untuk menggali informasi mengenai topik penelitian secara lisan dan mendalam, tentunya dengan pemilihan narasumber yang tepat sehingga pada pelaksanaannya akan memudahkan peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Peneliti memilih studi literatur atau studi kepustakaan untuk mendukung penelitian dalam menyusun skripsi atau karya ilmiah ini. Studi literatur dilakukan guna mendapatkan data-data atau sumber yang dibutuhkan oleh peneliti dalam menyusun tulisannya. Mengutip pendapat Ismaun (2005, hlm. 35) sumber sejarah ialah bahan baku yang dapat digunakan sebagai informasi tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Sumber-sumber tersebut kedepannya akan dijadikan sebagai rujukan utama dan pedoman peneliti dalam penyusunan skripsi. Peneliti berharap

dengan menggunakan studi literatur ini mampu membangun dan mengembangkan landasan teori yang digunakan serta membentuk kerangka berpikir kesejarahan, sehingga peneliti mampu memahami secara pasti mengenai sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Di bawah Republik Islam Iran, diskriminasi dan segmentasi yang berdasar pada agama dan gender telah dilembagakan dalam konstitusi, kebijakan pemerintah, dan ideologi negara (Tohidi, 2010, hlm. 4). Sistem yang ada dalam pemerintahan ini banyak menguntungkan laki-laki dibandingkan perempuan. Adapun selain diskriminasi gender, kebijakan pemerintah Iran pun lebih banyak menguntungkan orang Muslim serta golongan Syiah.

Dalam penerapan ideologi negaranya, Iran terus melanggengkan budaya patriarki, dan diperkuat (seolah-olah dibenarkan) oleh interpretasi patriarki sebagai sumber suci agama Islam. Landasan dari ideologi gender Republik Islam adalah keyakinan bahwa pria dan wanita pada dasarnya adalah “berbeda” makhluk di alam. Keyakinan ini berasal dari pandangan dunia Islam konservatif di mana pria dan wanita ada, fungsi, dan berhubungan satu sama lain hanya dalam batas hirarki gender “alami”. Artinya, karena perbedaan yang diberikan Allah dalam hal biologi dan psikologi, pria dan wanita memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam masyarakat.

Menurut Barlow dan Akbarzadeh (2008, hlm. 2) di Iran, hal ini telah diterjemahkan ke dalam kenyataan bagi perempuan di mana mereka menduduki status subordinat manusia. Elit konservatif Iran menganggap wanita lebih rendah daripada pria dalam hal rasionalitas dan kemampuan mereka untuk menjalani kehidupan otonom. Dalam pandangan elit, faktor penting dalam pemeliharaan kohesi sosial di Iran adalah kontrol pria

atas perempuan. Oleh karena itu, meskipun retorika konstitusi Republik Islam, perempuan Iran didiskriminasikan karena gender mereka; mereka tidak menikmati kesetaraan secara de facto atau penuh de jure dengan pria. Kehendak atas kuasa ideologi yang berdasarkan kepada agama ini, menjadi hal yang fundamental sebagai dalih atas kuasa laki-laki terhadap perempuan. Padahal jika dilihat lebih dalam, sejatinya dalam agama Islam maupun agama-agama lainnya, tidak pernah membedakan hak-hak manusia, baik itu perempuan pun laki-laki. Keduanya merupakan manusia yang akan dianggap sama oleh Tuhan. Banyaknya klaim dan konsep-konsep yang diterjemahkan oleh manusialah yang menjadikan agama-agama tersebut memiliki pandangan patriarki di mana perempuan harus mengikuti dan berada di belakang laki-laki.

Perempuan di Iran tunduk pada pembatasan yang diberlakukan oleh keluarga dan masyarakat mereka. Negara ini memiliki budaya patriarkal yang memberi laki-laki kekuasaan atas perempuan dan properti. Menurut Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan, status bawahan perempuan dalam masyarakat Iran diabadikan oleh dua faktor utama: nilai-nilai patriarkal dan sikap yang mendukung norma supremasi laki-laki dan struktur kelembagaan yang dipromosikan negara berdasarkan interpretasi garis keras prinsip-prinsip Islam. Sementara yang pertama adalah fenomena universal, yang terakhir ini khusus untuk politik gender Iran dan kebijakan yang lazim di negara ini sejak Revolusi 1979. Kedua faktor menekankan gagasan bahwa peran seorang wanita terutama adalah seorang istri dan seorang ibu, yang digunakan sebagai pembenaran untuk membatasi kehidupan publik wanita.

Diskriminasi Perempuan di Iran

Diskriminasi di Iran yang terjadi kepada para perempuan sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat di dalamnya. Mengutip dari pernyataan ILO (*International Labour*

Organization) dalam konvensi ILO No. 111 (1958), diskriminasi merupakan suatu perbedaan, eksklusif atau preferensi yang dibuat berdasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik, etnis nasional atau asal muasal yang memiliki dampak meniadakan atau menghambat kesetaraan peluang atau perlakuan dalam hal pekerjaan atau jabatan. Lebih jauh lagi bahwa diskriminasi atau perbedaan yang dialami oleh para perempuan Iran merupakan identitas yang ditiadakan, dalam hal ini identitas politik dan identitas sebagai perempuan beserta dengan hak-hak yang dimilikinya.

Adanya tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan di Iran tidak lepas dari perjalanan panjang pasca revolusi Iran. Diskriminasi ini banyak terjadi di ruang-ruang publik maupun privat sehingga menyempitkan gerak setiap perempuan. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Tohidi (2010, hlm. 4), yaitu "The constitution and the Shari'a-based penal and civil codes, especially those sections pertaining to family and personal status, legalize the subordination of women, treating them as second-class citizens with unequal rights" (konstitusi dan hukum pidana dan perdata berbasis kode etik syariah, terutama bagian yang berkaitan dengan status keluarga dan pribadi, melegalkannya adanya subordinasi terhadap perempuan, memperlakukan mereka sebagai warga kelas kedua dengan hak yang tidak sama).

Hukum-hukum yang dijalankan oleh pemerintah Iran mencerminkan adanya standar ganda yang tentunya merugikan kaum perempuan. Jika dilihat dari pasal-pasal yang dalam konstitusi, memang pemerintah Iran menyatakan bahwa adanya persamaan hak yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Namun, mereka juga tetap menegakan aturan berdasarkan Syariat dan standar Islam yang secara efektif membatasi hak para perempuan. Oleh karena itu, setiap perubahan atau reformasi yang terkait dengan pemenuhan hak-hak perempuan dipengaruhi oleh politik

ulama dan interpretasi Islam.

Maka jelas bahwa budaya patriarkal yang dijalankan negara memaksa perempuan untuk tetap diam tentang pelecehan yang ditimbulkan pada mereka oleh laki-laki dalam keluarga mereka. Bentuk-bentuk kekerasan ringan terhadap perempuan dan anak-anak umumnya ditoleransi ketika tindakan dipandang perlu untuk disiplin. Mengakui pelecehan kepada orang luar dianggap membawa rasa malu kepada korban.

Pada 1990-an dan pada awal 2000-an, institusi sipil wanita berupaya untuk meniadakan diskriminasi gender dan berusaha menjangkau wanita dan wanita kelas menengah dari latar belakang kelas bawah. Beberapa kampanye diluncurkan oleh koalisi aktivis perempuan sekuler dan Muslim di 2006, yakni kampanye 1.000.000 tanda tangan untuk mengubah hukum diskriminatif, kampanye terhadap merajam dan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, dan kampanye syal putih terhadap pemisahan seks di stadion. Proses ini dan kemampuan lembaga ini untuk menjadi efektif telah sangat melemah selama kepresidenan Mahmoud Ahmadinejad. Dalam situasi mengerikan ini perempuan kelas menengah perkotaan, konstituensi inti dan mesin gerakan perempuan, telah mencapai kesimpulan bahwa kesetaraan gender dan demokrasi terjalin, dan bahwa perempuan Iran tidak akan mendapatkan hak kewarganegaraan tanpa berjuang untuk demokrasi (Kian, 1997, hlm. 61).

Sebagai hasil dari perjuangan perempuan dan pertanyaan mereka tentang peran gender tradisional dan identitas dan advokasi hak-hak yang sama, hukum tentang prosedur mengenai pilihan hakim direformasi pada tahun 1996 yang mengarah ke representasi yang lebih baik perempuan dalam peradilan. Menurut undang-undang baru hakim perempuan dapat ditunjuk sebagai hakim memeriksa, konselor di pengadilan administrasi, pengadilan keluarga, dan kantor perlindungan anak di bawah umur.

Perjuangan Awal Shirin Ebadi

Menurut Shirin Ebadi (2004, hlm. 72) ia sangat beruntung memiliki keluarga yang memungkinkan kepribadiannya berkembang. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang selalu memiliki ide pemikiran yang berbeda tanpa pernah menyerah atau kompromi terhadap ide tersebut. Ia mengambil contoh kehidupan ayahnya pada tahun 1953 yang dengan berani menolak berkompromi dengan pihak Barat demi menyelamatkan karirnya. Keberanian ayahnya menjadi teladan bagi Ebadi untuk tampil berani dalam melawan tekanan. Begitupun dalam kehidupannya ketika menghadapi tekanan pemerintah Iran, Ebadi memandang Islam hanya dijadikan sebagai alat kekuasaan ideologis. Ebadi dengan lantang menyuarakan kesetaraan untuk semua orang, terlepas dari gender atau agamanya.

. Menyusul kemenangan Revolusi Islam pada Februari 1979, Islam menurut pandangan pemerintah melarang wanita untuk bekerja sebagai hakim. Ebadi dan hakim wanita lainnya diberhentikan dari pekerjaannya dan malah diberikan tugas klerikal. Hal ini membuat Ebadi dan anggota lainnya memprotes kebijakan tersebut. Akibat protes mereka, semua mantan hakim perempuan termasuk Ebadi ditempatkan untuk mengisi posisi 'ahli' di Departemen Kehakiman. Ebadi tidak bisa mentolerir situasi lebih lama lagi, kemudian ia mengajukan permohonan untuk pensiun dini. Sejak asosiasi ditutup untuk beberapa waktu sejak revolusi, Ebadi meminta lisensi praktik hukum namun ditolak. Akibatnya, Ebadi tinggal di rumah selama bertahun-tahun. Akhirnya, pada tahun 1992 Ebadi berhasil mendapatkan lisensi pengacara dan mengatur praktiknya sendiri (Gupta, 2016, hlm. 230).

Ebadi adalah seorang Muslim yang berpendapat bahwa Islam sepenuhnya kompatibel dengan hak asasi manusia dan demokrasi. Banyak ketidaksetaraan yang ditemukan di negara-negara Muslim yang menurutnya adalah karena budaya patriarki yang mendahului Islam. Modernisasi dapat

dicapai tanpa bertentangan dengan Islam. Ebadi telah bekerja untuk hak asasi manusia, memperjuangkan perempuan, hak-hak anak dan pengungsi. Dia belajar di Teheran dan diangkat sebagai salah satu hakim wanita Iran pertama saat masih berusia 20-an.

Setelah Revolusi 1979 dia terpaksa mengundurkan diri sebagai hakim dan mengambil lisensi untuk menjadi pengacara. Selain itu, dia menulis buku tentang hak-hak anak; kemudian hak-hak pengungsi. Dia telah melanjutkan praktik hukumnya dan juga mengajar di Universitas Teheran. Dengan risiko tertentu ia menulis dan berbicara atas nama demokrasi, kebebasan berbicara dan kebebasan beragama (Stiehm, 2005, hlm. 270). Dalam sejarah pergerakan di Iran, Ebadi merupakan tokoh penting yang namanya harus diangkat. Peran Ebadi dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dimulai sejak tahun 1990-an. Sejak perkembangannya di tahun 1990-an, gerakan perempuan kontemporer Iran telah menjadi salah satu gerakan yang paling penting untuk perubahan dalam masyarakat Islam dan salah satu gerakan perempuan berskala besar dan populer di dunia. Perempuan Iran telah berjuang untuk reformasi legislatif, politik dan demokrasi di negara mereka dan telah berhasil mencapai reformasi penting, terutama di bidang hukum keluarga (Shofiyah, 2019 hlm. 97). Namun, pada bulan Juni 2000, ia ditangkap bersama dengan pengacara reformis lainnya, karena diduga menyebarkan pengakuan direkam dari seorang anggota milisi main hakim sendiri garis keras yang terlibat dalam kekerasan antireformis. Dia ditahan di penjara selama tiga minggu, dan kemudian menerima hukuman penjara yang ditangguhkan selama lima tahun dan dilarang mempraktikkan hukum dalam persidangan tertutup. Karyanya telah memenangkan penghargaan dari Human Rights Watch, Amnesty International, dan pada tahun 2001 ia dianugerahi penghargaan Rafto hak asasi manusia. Profil yang dirilis oleh Komite Nobel setelah pengumuman Hari Jumat mengatakan, "Baik dalam penelitiannya

maupun sebagai aktivis, ia dikenal karena mempromosikan solusi damai dan demokratis untuk masalah serius di masyarakat. Dia mengambil bagian aktif dalam debat publik dan terkenal dan dikagumi oleh masyarakat umum di negaranya untuk pembelaannya di pengadilan korban serangan faksi konservatif terhadap kebebasan berbicara dan kebebasan politik.

Selain itu, ada pula gerakan yang dilancarkan oleh aktivisme perempuan organisasi nonpemerintah (LSM) yang berjuang untuk hak-hak perempuan melalui aktivisme masyarakat sipil yang dimulai sejak pertengahan tahun 1990-an. Mereka memiliki peran penting dalam menentang negara, mempertahankan demokrasi dan mengangkat isu kompatibilitas dan modernitas Islam, serta hak perempuan dalam Islam (Rostami dan Povey, 2012, hlm. 28). Beragam gerakan perempuan lainnya yang tumbuh pada tahun 1990-an adalah melalui jurnal perempuan, penerbit, seniman, pengacara, hakim dan aktivis politik (Rostami dan Povey, 2012, hlm. 174). Perjuangan gerakan perempuan yang diusung oleh Shirin Ebadi ini jika ditinjau dari aspek sosiologi, merujuk pada salah satu perjuangan gerakan sosial. Mengutip Sunarto (2004, hlm. 194-195) mengemukakan bahwa gerakan sosial pada dasarnya adalah aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal yang berbentuk organisasi, berjumlah besar atau individu yang secara spesifik berfokus pada isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan, menolak atau mengampanyekan sebuah perubahan sosial.

Semua perjuangan Ebadi dalam menegakkan keadilan dan hak asasi manusia tertuang dalam bukunya *Until we are free My fight for human rights in Iran* (2016). Dalam memandang semua masalahnya, Ebadi (2008, hlm. 28) berpikir bahwa pemerintah Iran menderita fobia karena mereka percaya bahwa semua orang siap untuk menggulingkan rezimnya. Bahkan perempuan yang sebenarnya hanya menuntut hak yang sama, dituduh merusak keamanan nasional

ketika kasus mereka muncul. Dalam kasus lain, pekerja yang mencari upah lebih tinggi juga dituduh mengambil tindakan melawan keamanan nasional.

Pencapaian Perjuangan Shirin Ebadi terhadap Kehidupan Perempuan Iran

Meskipun tidak secara menyeluruh mendapatkan dampak bagi kehidupan perempuan di Iran, namun setidaknya beberapa aspek kehidupan sosial politik ulai diisi oleh sebagian kecil perempuan di Iran. Kursi parlemen yang semula diisi penuh oleh para laki-laki kini kaum perempuan pun sudah mulai bisa berkecimpung dalam dunia politik di Iran.

Perjuangan yang dilakukan oleh para perempuan Iran terus berlangsung hingga sekarang, nobel perdamaian yang didapatkan oleh Shirin Ebadi sebagai agen perdamaian dunia, khususnya yang menyoroti mengenai ketidakmampuan perempuan dalam melawan kekerasan yang terjadi tidak sebatas hanya penghargaan saja. Shirin Ebadi tetap berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan terutama dalam kehidupan sosial masyarakat.

Meskipun pemberontakan mahasiswa memiliki hasil yang mengerikan, dan 88 intelektual telah dibunuh, dari 1997 untuk 2005, ada sedikit gangguan dalam kehidupan masyarakat. Polisi moralitas, sementara masih aktif, yang tampak pada lebih sebagai gangguan dari apa pun. Pada 2000, para reformis menyapu Parlemen, dan 14 anggota parlemen (MPs) perempuan progresif memasuki legislatif. Rasio ini mirip dengan perwakilan perempuan di negara-negara Eropa. Luar biasa mereka tidak pernah diberikan di mana saja untuk duduk. Ketika Ebadi pergi ke ruang wanita swasta untuk merancang resolusi hukum keluarga, dia terkejut melihat sebuah ruangan kosong dengan permadani di lantai. Anggota parlemen perempuan lebih suka ruang kosong ke ruangan di mana para pria berada, karena mereka bisa menghapus chadors mereka.

Dengan suasana yang baru, lebih santai, kafe, galeri dibuka, dan konser outdoor diadakan di taman. Internet membuka sebuah dunia baru kepada kaum muda. Ratusan ribu lulusan perguruan tinggi sedang bergejolak, tetapi pasar kerja yang kompetitif, dan tidak ada kesempatan nyata untuk kemajuan. Muda mulai pindah ke negara lain, yang menyebabkan otak lain menguras. Meskipun ada lebih banyak toleransi, Ebadi selalu harus waspada. Jurnalis ganji menghadiri sebuah konferensi di Berlin, Jerman, pada 2000. Ketika ia kembali, ia dituduh sebagai “anti-Islam” dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara (Brown, 2007, hlm. 80).

Keyakinan itu akhirnya mengajukan banding, tetapi pada akhirnya ia dikirim ke penjara selama 6 tahun dengan tuduhan mengumpulkan informasi berbahaya bagi keamanan nasional. Pada tahun yang sama, ia diberi International Press Freedom Award oleh wartawan Kanada untuk ekspresi bebas. Ayatullah yang tumbuh sakit Surat Kabar reformis. Pada 2001, Ebadi diperingatkan untuk menjatuhkan kasus yang melibatkan seorang wartawan teman. Suatu malam ketika dia pulang ke rumah bersama kedua putrinya, seorang pria menghampiri mereka dan mengatakan bahwa dia membutuhkan bantuan hukum. Dia menyuruhnya untuk datang ke kantornya, tetapi ketika pesta pernikahan dimulai ke arah mereka, dia melarikan diri. Dia yakin dia adalah seorang pembunuh. Ketika ia mengatakan kepada seorang teman melalui telepon, ia kemudian terancam untuk menyebarkan rumor palsu tentang seorang pembunuh imajiner. Tahun itu ia juga menciptakan pembela hak asasi manusia pusat untuk membawa pengacara bersama-sama untuk bekerja pro bono untuk pembangkang. Ia menjabat sebagai presidennya.

SIMPULAN

Perjuangan Shirin Ebadi merupakan simbol perlawanan perempuan terhadap dominasi patriarki dan represi politik di Iran. Melalui kiprahnya sebagai pengacara, hakim, dan aktivis hak asasi manusia, Ebadi menentang sistem hukum dan sosial yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Ia berupaya memperjuangkan kesetaraan gender, kebebasan berpendapat, dan hak-hak sipil melalui pendekatan damai serta reformasi hukum dan sosial.

Perjuangan Ebadi berakar pada keyakinannya bahwa Islam dan hak asasi manusia tidaklah bertentangan, melainkan dapat berjalan beriringan jika ditafsirkan secara progresif dan humanis. Upayanya mendirikan Defenders of Human Rights Center menjadi wujud konkret dari komitmennya memperjuangkan hak perempuan dan anak-anak korban ketidakadilan. Meskipun ia menghadapi tekanan, pemenjaraan, dan ancaman dari rezim, perjuangannya tetap berlanjut dan memberi dampak signifikan pada kesadaran sosial-politik masyarakat Iran, terutama pada keterlibatan perempuan di ranah publik dan politik. Dengan demikian, figur Shirin Ebadi menggambarkan model perjuangan perempuan Muslim yang modern dan rasional, yang berupaya merekonsiliasi nilai-nilai agama dengan prinsip hak asasi manusia universal. Perjuangannya menegaskan bahwa reformasi sosial tidak harus melalui kekerasan, melainkan melalui pendidikan, hukum, dan kesadaran kemanusiaan yang berlandaskan keadilan dan kesetaraan

REFERENSI

Aghajani, M., & Sadeghi, L. (2020). Iranian women's rights movement after the revolution: Between Islamism and

- feminism. *Journal of Middle East Women's Studies*, 16(3), 312–329. <https://doi.org/10.1215/15525864-8594201>.
- Aghajani, M., & Sadeghi, L. (2020). Iranian women's rights movement after the revolution: Between Islamism and feminism. *Journal of Middle East Women's Studies*, 16(3), 312–329. <https://doi.org/10.1215/15525864-8594201>
- Ahmad, I. (2004). *Shirin Ebadi: A Muslim woman Nobel Peace laureate*. Social Education, 68(4), 260.
- Bakhtiar, L. (2019). Feminism and reform in modern Iran: Reassessing Islamic jurisprudence on women's rights. *Iranian Studies*, 52(6), 947–963. <https://doi.org/10.1080/00210862.2019.1634051>
- Barlow, R., & Akbarzadeh, S. (2008). Prospects for feminism in the Islamic Republic of Iran. *Human Rights Quarterly*, 30(1), 21–40. <https://doi.org/10.1353/hrq.2008.0009>
- Behdad, A., & Nomani, F. (2021). The paradox of gender equality in post-revolutionary Iran. *International Journal of Middle East Studies*, 53(4), 589–607. <https://doi.org/10.1017/S0020743821000435>
- Dewi, L. P., & Suwitra, I. (2022). Gerakan feminisme Islam dan perlawanan perempuan terhadap represi negara: Kajian terhadap sosok Shirin Ebadi. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 6(2), 101–115. <https://doi.org/10.17509/jshp.v6i2.42056>
- Ebadi, S. (2004). *Human rights, women and Islam* (pp. 30–32). Leiden University Repository. <https://hdl.handle.net/1887/16933>
- Ebadi, S. (2004). "Tell them to use their heads." *Index on Censorship*, 33(4), 72–76. <https://doi.org/10.1080/03064220408537410>
- Ebadi, S. (2006). *Iran awakening: A memoir of revolution and hope*. Random House.
- Ebadi, S. (2008). View from Iran. *Index on Censorship*, 37(3), 26–30. <https://doi.org/10.1080/03064220802306754>
- Ebadi, S. (2015). Is anyone free to report on Iran? *Foreign Policy*, (213), 22.
- Esfandiari, H. (2022). The unfinished revolution: Women and democracy in Iran. *Middle East Policy*, 29(4), 65–79. <https://doi.org/10.1111/mepo.12642>
- Gupta, R. (2016). Shirin Ebadi and Gloria Steinem on perspective as key to addressing violence. *Antyajaa: Indian Journal of Women and Social Change*, 1(2), 229–245. <https://doi.org/10.1177/2455632716675011>
- Kia, M. (2019). Women, gender, and revolution in Iran: A review of feminist activism. *Middle East Review*, 31(2), 55–72. <https://doi.org/10.1080/1475262X.2019.1554421>
- Mahmoudi, F. (2021). Gendered dissent and Islamic reform: Shirin Ebadi's struggle for human rights. *Asian Journal of Women's Studies*, 27(3), 312–328. <https://doi.org/10.1080/12259276.2021.1918994>
- Maulana, R., & Supriatna, N. (2019). Ekofeminisme: Perempuan, alam, perlawanan atas kuasa patriarki dan pembangunan dunia (Wangari Maathai dan Green Belt Movement 1990–2004). *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 8(2), 261–276. <https://doi.org/10.17509/factum.v8i2.22156>
- Mernissi, F. (1991). *The veil and the male elite: A feminist interpretation of women's rights in Islam*. Addison-Wesley.
- Meylawati, N. I., Supriatna, N., & Darmawan, W. (2022). Feminisme sosialis: Gerakan Clara Zetkin dalam perjuangan identitas dan kelas perempuan di Jerman 1891–1917. *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 12(2), 245–256. <https://doi.org/10.17509/factum.v12i2.38928>
- Mir-Hosseini, Z. (2023). Islamic feminism revisited: Reformist discourses and Shirin Ebadi's human rights vision. *Journal of Feminist Studies in Religion*, 39(1), 77–93. <https://doi.org/10.2979/jfemstudreli.39.1.07>
- Moghadam, V. M. (2005). Globalizing women:

- Transnational feminist networks. Johns Hopkins University Press.
- Naraynan, R. (2021). *Until we are free: My fight for human rights in Iran by Shirin Ebadi* [Review essay].
Open Letter by Shirin Ebadi to President Mahmoud Ahmadinejad. (n.d.). Humanrights-ir.org. https://web.archive.org/web/20130729070722/http://www.humanrights-ir.org/php/view_en.php?objnr=284
- Rashidi, S., & Hosseini, F. (2024). Human rights and Islam in Iran: Shirin Ebadi's legacy in contemporary activism. *Global Ethics Journal*, 8(1), 45–61. <https://doi.org/10.1016/j.gej.2024.01.004>
- Rostami, N., & Povey, T. (2012). *The women's movement in historical context: Women, power and politics in 21st century Iran.* Routledge.
- Sardar, Z. (2017). *Reading the Qur'an: The contemporary relevance of the sacred text of Islam.* Oxford University Press.
- Sjamsuddin, H. (2012). *Metodologi sejarah.* Ombak.
- Sternfeld, L. (2023). *The Shah's son and the future of Iranian opposition.* Foreign Policy Research Institute (FPRI). <https://coilink.org/20.500.12592/v5k2ht>
- Vakil, S. (2011). *Women and politics in the Islamic Republic of Iran: Action and reaction.* Bloomsbury Academic.